



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA TIMUR-UTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TENTANG
BIDANG HUKUM

Nomor : W.10.PAS.PAS.7.HH.04.05- 2

Nomor : PKS/FH-UMSURYA/048/III/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NETY SARASWATY** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara berkedudukan di Jalan Pembina I Nomor 2 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13420, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. NIRU ANITA SINAGA** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma berkedudukan di Jalan Angkasa I Blok N No.7K RT 7 RW 9, Kel. Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Jakarta Timur 13610 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **Para Pihak** dalam rangka kerja sama pelaksanaan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS) dalam bidang hukum dan kepribadian bagi Klien Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman dalam bidang hukum serta kesadaran berbangsa dan bernegara bagi klien.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Menyediakan akses keadilan bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara;
- b. Menyediakan akses pendampingan dan konsultasi di bidang hukum bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara;
- c. Menyediakan akses penyuluhan dan edukasi di bidang hukum bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara;
- d. Kegiatan lain di bidang hukum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengarahkan Klien untuk menaati aturan dan tata tertib yang berlaku selama mengikuti bimbingan hukum;
 - b. Melakukan pengawasan secara langsung terhadap Klien selama pelaksanaan bimbingan hukum;
 - c. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan hukum;
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan pendampingan dan layanan konsultasi di bidang hukum kepada Klien;
 - b. Memberikan penyuluhan dan edukasi di bidang hukum kepada Klien;
 - c. Menyampaikan kendala-kendala atau masalah yang dihadapi selama proses pemberian bantuan di bidang hukum kepada Pihak Pertama.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan program bimbingan hukum;
 - b. Melaksanakan program bimbingan hukum;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana selama pelaksanaan program bimbingan hukum berlangsung;
 - d. Membuat laporan pelaksanaan program bimbingan hukum.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Dalam pelaksanaannya, pihak II diperkenankan membawa mahasiswa fakultas hukum untuk melaksanakan kegiatan dimaksud
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Tidak ada pembiayaan yang dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 4 (empat) kali dalam 12 (dua belas) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan dan/atau Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 9
ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I
JAKARTA TIMUR-UTARA**

Kepala,


NIP 196812251991032001

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Dekan,


NIDN 0327106505